

IMPLEMENTASI PROGRAM PETANI MANDIRI MELALUI KARTU PETANI MANDIRI (KPM) PLUS DI KABUPATEN BOJONEGORO

Arinda Dias Fidiyanti¹, Anggraeny Puspaningtyas², Eddy Wahyudi³
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

arindadiasfidiyanti@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Implementasi kebijakan adalah proses yang sulit dan sering melibatkan banyak masalah. Untuk berhasil, perlunya harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan menerapkan metode yang sesuai dengan situasi dan persyaratan khusus. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, khususnya petani yang kurang memperoleh peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan usaha tani mereka. Untuk memperoleh manfaat dari Program Petani Mandiri (PPM) yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, petani harus mempunyai Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle. Berdasarkan hasil penelitian implementasi program petani mandiri ini berisikan bantuan modal bernilai maksimal 10 juta dan bantuan-bantuan yang diterima oleh kelompok tani sesuai dengan yang diajukan, jaminan asuransi gagal

panen, pembelian hasil pertanian, pelatihan, serta beasiswa bagi keluarga petani. Program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran namun belum maksimal dikarenakan masih rendahnya SDM para petani, kurangnya sumber daya manusia sehingga sosialisasi atau pendampingan kepada kelompok tani kurang.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Program Petani Mandiri, Kelompok Tani

ABSTRACT

Policy implementation is a difficult process and often involves many problems. To be successful, it is necessary to understand the factors that influence implementation and apply methods appropriate to the specific situation and requirements. To improve the welfare of the people of Bojonegoro, especially farmers who lack access to increased human resources (HR) and development of their farming businesses. To benefit from the Independent Farmer Program (PPM) launched by the Bojonegoro Regency government, farmers must have an Independent Farmer Card (KPM) Plus. The method used in this research is descriptive qualitative using Grindle's policy implementation theory. Based on research results, the implementation of this independent farmer program contains capital assistance with a maximum value of 10 million and assistance received by farmer groups in accordance with what was proposed, insurance guarantees for crop failure, purchase of agricultural products, training and scholarships for farmer families. This program is running well and is on target but is not yet optimal due to the lack of human resources for farmers, lack of human resources so there is a lack of socialization or assistance to farmer groups.

Keywords: Implementation Of Public Policy, Independent Farmer Program, Farmer Groups

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terkurung daratan dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Karena kekayaan sumber daya alamnya, pertanian menjadi sektor yang paling aktif jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja dan penyediaan penghasilan bagi banyak rumah tangga di pedesaan, seperti yang dijelaskan oleh Tati Budiarti (2013). Sektor ini terdiri dari banyak subsektor seperti hortikultura, tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, yang semuanya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung industri nasional, terutama di daerah pedesaan. Untuk meningkatkan hasil pertanian, memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan menciptakan lapangan kerja yang luas, sektor pertanian Indonesia didukung oleh luasnya lahan pertanian dan iklim tropis (Nurhidayat, Sundari, Rudiyanto, 2022).

Luas panen padi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 10,45 juta hektar, meningkat sebesar 40,87 ribu hektar atau 10,39% dibandingkan dengan luas panen tahun 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar. Pada tahun 2022 produksi padi mencapai 54,75 juta ton gabah kering giling, meningkat sebanyak 333,68 ribu ton atau 10,61% dari produksi padi tahun 2021 yang sebesar 54,42 juta ton gabah kering giling. Pada tahun 2022 konsumsi beras penduduk mencapai 31,54 juta ton, naik sebanyak 18,45 ribu ton atau 0,59% dibandingkan konsumsi beras tahun 2021 yang sebesar 31,36 juta ton. (sumber <https://www.bps.go.id/2023>).). Salah satu sektor paling penting di dunia adalah pertanian.

Data menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 2, menghapuskan kelaparan dan mencapailketahanan pangan, dan memperbaiki nutrisi dan gizi (Arief Suyoto & Susilo Adib, 2019). Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup kita sekaligus memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pertanian adalah sektor ekonomi yang sangat potensial di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja serta sangat memperhatikan pertumbuhan pertanian (Hayati mimi, Elfiana, Martina, 2017). Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Salah satu alasan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian adalah fakta bahwa negara tersebut adalah agraris (Suratha, 2017). Diharapkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dicapai berkat sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah membangun berbagai infrastruktur, pertahanan dan keamanan, pendidikan, serta sektor lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Salah satu pembangunan yang memiliki dampak langsung signifikan pada kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan ekonomi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani angka 2 dari Pasal 1 menyatakan "Pemberdayaan itu menyangkut upaya peningkatan kemampuan petani dalam berusaha." pertanian melalui pendidikan dan Pertumbuhan sistem dan fasilitas penjualan hasil pertanian, stabilitas dan jaminan luas lahan pertanian, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani". Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani agar menjadi petani yang modern, berdaya saing, berkelanjutan, produktif, dan bernilai tambah. Prioritas utama perlindungan dan pemberdayaan ini adalah petani, khususnya petani penggarap dengan luas lahan sekitar dua hektar. Ini tidak termasuk petani yang menjadikan usaha tani sebagai mata pencaharian utama mereka. Peraturan



perundang-undangan ini berlaku untuk petani budidaya tanaman kebun, pekebun, serta peternak dalam lingkup usaha kecil.

Dalam upaya membantu kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, terutama para petani yang kurang menerima peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan usaha tani mereka. Untuk memperoleh manfaat dari program Petani Mandiri (PPM) yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, petani harus mempunyai Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus. Program Petani Mandiri (PPM) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani melalui hibah modal berupa barang yang diberikan kepada mereka. Di sisi lain, sesuai dengan undang-undang, Kartu Petani Mandiri Plus diberikan kepada keluarga petani dan berfungsi sebagai identitas dan penanda sekaligus memberikan akses ke manfaat Program Petani Mandiri (PPM). Program ini adalah bagian dari langkah pemerintah daerah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 tahun 2013, serta Peraturan tentang Program Petani Mandiri yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 48 tahun 2018 dan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2018. Selain itu, tujuan PPM (Program Petani Mandiri) ini adalah untuk melaksanakan visi, misi, dan program kerja Meningkatkan kesehatan dan kemandirian petani di Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Bupati yang akan mengatur implementasi program tersebut, diharapkan dapat dijalankan secara efisien dan menguntungkan masyarakat, terutama para petani. Kartu Petani Mandiri diberikan kepada petani. Sejumlah Petani di Kabupaten Bojonegoro akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka bergabung dengan Program Petani Mandiri. Kondisi ini kemudian memerlukan pengamatan lebih lanjut tentang cara peraturan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, apakah sudah jelas dan konsisten dan apakah masih ada hambatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan data yang valid dan relevan mengenai bagaimana implementasi program petani mandiri melalui kpm (kartu petani mandiri) plus di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro No 48 tahun 2018. Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses penelitian secara langsung dan melalui proses wawancara kepada informan. Selain itu penulis juga mengumpulkan berbagai materi yang berhubungan dengan Implementasi program petani mandiri melalui kpm (kartu petani mandiri) plus di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang dipengaruhi dua variabel yaitu :

Isi kebijakan (content of policy) yang meliputi :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam isi kebijakan
Dalam pelaksanaannya suatu kebijakan tentu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan pengaruh cukup besar terhadap proses kebijakan tersebut.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
Jalannya suatu proses kebijakan pasti akan menimbulkan dampak baik itu negatif atau positif.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah program dengan tujuan mengubah sikap ataupun perilaku seseorang biasanya lebih sulit di implementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
Dalam aspek ini memberikan penjelasan dimana letak suatu pengambilan keputusan dalam kebijakan yang pada akhirnya akan diterapkan.
5. Pelaksanaan program
Dalam menerapkan suatu kebijakan tentu saja harus ada pelaksana yang mampu dan kompeten dimana nanti akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan
6. Sumberdaya yang dilibatkan
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumberdaya yang memadai sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif.
Lingkungan implementasi (context of implementation):
 - 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - 2) Karakteristik institusi dan pemerintah yang sedang berkuasa
 - 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Implementasi Program Petani Mandiri melalui Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus di Kabupaten Bojonegoro

Program petani mandiri adalah hibah yang berupa modal yang berwujud barang kepada petani untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian bagi petani, sedangkan kartu petani mandiri (KPM) plus adalah kartu yang diberikan kepada keluarga petani sesuai dengan kriteria sebagaimana perundang-undangan sebagai penanda atau identitas sekaligus akses untuk mendapatkan manfaat program petani mandiri (PPM). Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri, Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan kedua peraturan Bupati nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri, Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 49 tahun 2021 tentang perubahan ketiga peraturan Bupati Bojonegoro nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri, Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan keempat peraturan Bupati Bojonegoro nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri. Dengan memiliki kartu petani mandiri (KPM) plus keluarga petani dapat mengakses Program Petani Mandiri (PPM) yang berisikan bantuan modal dengan nilai maksimal 10 juta rupiah berupa barang, mendapatkan pelatihan dan pengembangan usaha tani, memperoleh jaminan pembelian hasil pertanian, mendapatkan asuransi gagal panen, dan akses beasiswa bagi keluarga petani. Berikut syarat untuk mendapatkan kartu Petani Mandiri:

- 1) Tergabung dalam kelompok tani
- 2) Memiliki lahan kurang dari 2 ha
- 3) Fotokopi kartu keluarga
- 4) Kepemilikan lahan / penggarap dibuktikan dengan
 - a. Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah (surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti fotokopi SPPT PBB)
 - b. Surat keterangan dari perum perhutani disertai dengan fotokopi perjanjian kerjasama bagi anggota kelompok tani yang mengelola lahan kawasan hutan
 - c. Surat keterangan dari kantor cabang kehutanan disertai dengan fotokopi berita acara penetapan luasan areal garapan tapak izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) bagi anggota kelompok tani yang mengelola lahan kawasan perhutanan sosial.
- 5) Fotokopi kartu tanda penduduk

Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 48 tahun 2018 tentang program petani mandiri merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi petani yang berisikan bantuan modal, pembelian

hasil panen, asuransi gagal panen, pelatihan bagi petani, dan bantuan beasiswa bagi keluarga petani. Implementasi kebijakan menurut teori Grindle yakni Isi kebijakan (content policy) berikut konteks dari isi kebijakan menurut teori Grindle :

Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program petani mandiri melalui kartu petani mandiri di Kabupaten Bojonegoro yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Bojonegoro. Dimana program ini tercantum dalam Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri, terdapat target yang harus dicapai yaitu memberikan kesejahteraan bagi para petani di Kabupaten Bojonegoro karena termasuk salah satu Kabupaten penghasil padi terbesar nomor tiga di Jawa Timur.

Jenis manfaat

Petani dapat memanfaatkan program ini untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian kabupaten Bojonegoro, baik dalam bentuk barang atau pelatihan yang dapat membantu dan memberikan kesejahteraan bagi petani. Tetapi tidak semua petani mendapatkan manfaat dari program ini, karena syarat utama penerima manfaat program petani mandiri ini petani memiliki kartu petani mandiri dan tergabung dalam kelompok tani dan memiliki lahan kurang dari 2 hektar.

Tahun	Jumlah kepemilikan kartu petani mandiri	Jumlah terdaftar asuransi gagal panen
2023	212.076	332 petani

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro

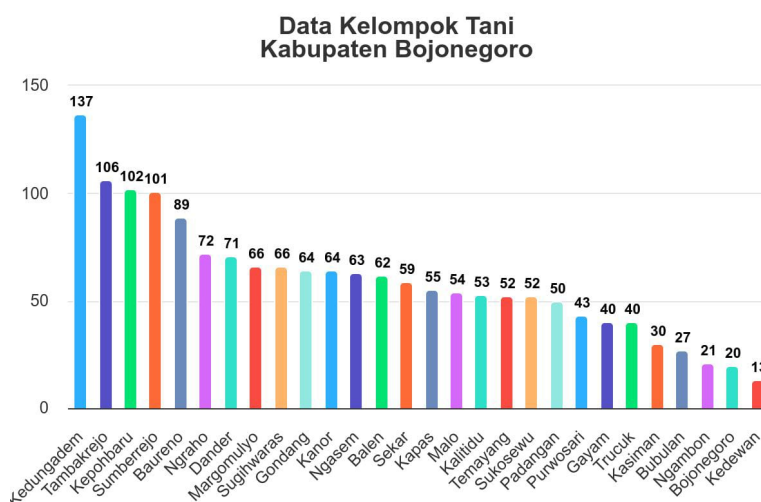
Dari tabel diatas dapat dijelaskan jumlah kepemilikan kartu petani mandiri (KPM) plus di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 yaitu 212.076 dan jumlah petani yang terdaftar asuransi gagal panen sebanyak 332 petani, hal ini dikarenakan masih rendahnya SDM para petani sehingga mereka kurang memahami manfaat jika terdaftar asuransi.

Perubahan yang ingin dicapai

Tujuan utama adanya program petani mandiri ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi petani melalui bantuan-bantuan yang diberikan. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber peneliti menyimpulkan perubahan dirasakan oleh kelompok tani, akan tetapi belum sesuai dengan tujuan yang ada karena masih rendahnya SDM para petani dan gagal pengentahuan teknologi serta kurangnya sumber daya manusia sehingga kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi.

Apakah letak program sudah tepat

Setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti mengetahui bahwa letak program sudah tepat yaitu bagi mereka yang termasuk dalam kriteria dan menjadi anggota kelompok tani. Hanya saja masih banyak petani yang kurang memahami setiap petunjuk yang ada jika akan mengajukan bantuan.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro

Pelaksanaan program

Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program petani mandiri ini, yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati yang sarannya kelompok tani di Kabupaten Bojonegoro. Sebelum bantuan diberikan petani harus mengajukan proposal yang diajukan melalui Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian, akan tetapi petani tidak boleh mengajukan setiap tahun berturut-turut bantuan yang diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah sesuai proposal yang diajukan. Setelah bantuan diberikan akan dibelanjakan barang, jika terjadi permasalahan dalam kelompok tani maka ketua kelompok tani yang bertanggung jawab melaporkan kepada petugas penyuluh lapangan.

Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya manusia dan biaya adalah dua sumber daya yang digunakan dalam program ini, dari kedua sumber daya ini sumber daya biaya yang paling penting dalam pelaksanaan program ini. Sumber daya manusia juga sangat membantu dalam menerapkan strategi yang telah dibuat sehingga setiap kelompok tani menerima bantuan secara merata. Adapun indikator yang kedua yaitu lingkungan implementasi (context of implementation) :

Kekuasaan, kepentingan-kepentingan yang terlibat dan strategi aktor yang terlibat

Dalam mengimplementasikan program petani mandiri yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 48 tahun 2018 terdapat Bupati sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kekuasaan dalam merumuskan kebijakan ini, selain itu ada Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian sebagai pelaksana program tersebut. Dalam program ini Dinas Pertanian mempunyai strategi, arah, dan penyaluran bantuan-bantuan serta pelatihan kepada kelompok tani. Program petani mandiri ini berisikan bantuan modal berupa barang yang diberikan kepada kelompok tani seperti pupuk, benih, dan alat pertanian. Selain itu juga terdapat pelatihan, jaminan asuransi gagal panen, pembelian hasil pertanian, dan beasiswa bagi keluarga petani.

Karakteristik institusi dan pemerintah yang sedang berkuasa

Program ini diimplementasikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani serta pemegang kartu petani mandiri di Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi petani.

Tingkat kepatuhan dan respon kelompok sasaran

Dengan adanya program petani mandiri ini kelompok tani penerima manfaat merasa senang dan sangat terbantu. Faktor pendukung implementasi program petani mandiri

melalui kartu petani mandiri di Kabupaten Bojonegoro ini adalah adanya perhatian dari pemerintah terhadap petani serta potensi hasil pertanian yang besar di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga sosialisasi kepada petani masih belum maksimal, rendahnya SDM para petani serta tidak paham teknologi sehingga program ini berjalan tidak maksimal sesuai tujuan yang diharapkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penyajian data yang sudah diuraikan di bab sebelumnya, maka dalam Implementasi Program Petani Mandiri melalui Kartu Petani Mandiri Plus di Kabupaten Bojonegoro penulis menggunakan teori implementasi dari Grindle yang terdapat dua variabel yaitu isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan (*content policy*) yang berisi 6 indikator yaitu kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, perubahan yang diinginkan, letak program apakah sudah tepat, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan lingkungan implementasi (*context of implementation*) berisi 3 indikator yaitu seberapa besar kekuasaan, karakteristik institusi dan pemerintah yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Jika dilihat dari dua variabel implementasi kebijakan menurut Grindle dan setelah penulis melakukan observasi, wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Mandiri melalui Kartu Petani Mandiri Plus di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan dengan baik namun masih belum maksimal bantuan-bantuan yang diberikan kepada kelompok tani sesuai yang mereka ajukan dan ada juga pelatihan-pelatihan di kelompok tani salah satunya pelatihan pembuatan pupuk cair akan tetapi kelompok tani kurang berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Masih banyak petani yang tidak ingin mendaftarkan jaminan asuransi gagal panen tanaman mereka, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya SDM para petani serta kurang paham dengan program ini dan kurangnya sumber daya manusia sehingga minimnya sosialisasi kepada petani.

Adapun faktor yang mendukung implementasi program petani mandiri melalui kartu petani mandiri di Kabupaten Bojonegoro ini adalah adanya perhatian dari pemerintah terhadap petani serta potensi hasil pertanian yang besar di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu rendahnya SDM para petani serta tidak paham teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan minimnya sosialisasi atau kurang maksimal sehingga program ini berjalan tidak maksimal sesuai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanti. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar). *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 1– 18.
- Anisa, F., & Adnan, M. F. (2021). Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), 1137–1150. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2496>
- Budi, S., Sugihardjo, S., & Permatasari, P. (2021). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 14(3), 299. <https://doi.org/10.19184/jsep.v14i3.26923>
- Hal, O., Kebijakan, I., Kartu, P., & Barugae, D. (2022). 38160-94609-1-Pb. 5(3), 737–744.
- Maghfiroh, R., Ati, N. U., & Sunariyanto. (2021). Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Respon Publik*, 15(4), 67–74.



- Mufidah, L. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (PPM). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1443–1448.
- Raharjo, J. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(1), 39–57.
- Siswantia Sari Agustina. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Sosial Petani Padidi Kecamatan Minggir. <http://e-journal.uajy.ac.id/22321/1/05122940.pdf>
- Sucahyo, I., Mubaroq, H., & ... (2022). Implementasi Program Kartu Tani Terhadap Ketersediaan Pupuk 2021 Di Desa Tegalmoyo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten *Journal of Innovation ...*, 2(4).
<https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3471%0Ahttps://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/download/3471/2510>
- Wahid, A., Gayatri, S., & Prayoga, K. (2021). Problematika Impelementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(3), 691–705.
<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.03.8>